

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DAN UPAH RIIL: ANALISIS TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

*(Female Labour Force Participation Rate and Real Wage:
Provincial-level Analysis in Indonesia)*

Siti Rogayah

Badan Pusat Statistik Indonesia
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, Indonesia 10710
Email: siro_gaya@bps.go.id

Naskah diterima: 19 Desember 2020

Naskah direvisi: 1 Februari 2021

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2021

Abstract

This research explores the relationship between two essential aspects of economic development, namely the Female Labour Force Participation (FLFP) rate and the hourly real wage growth in Indonesia. Using the GLS-Random Effect Regression Method for panel data applied to Sakernas, Susenas, and RGDP Data for 2002-2018 in 30 provinces, this research finds out that when FLFP in Indonesia keeps increasing over time, the hourly real wage drops. This is thought to occur allegedly because most female workers in Indonesia work in business fields with a low level of productivity, which causes the labour supply line of the labour supply curve to shift to the right, which means that the real wage point shifts to a lower level. Both female workers and male workers have experienced this reduction in the hourly real wage. Based on this finding, this research recommends that an effort to increase female workers' participation should be followed by a variety of more qualified jobs qualification for them. Also, some policies are needed to encourage the creation of wider job opportunities for women, especially in business fields with high productivity levels, and to eliminate various work barriers, both domestic and external, that would hinder female entry into the labour market.

Keywords: female labour force participation, labour supply, hourly real wage, panel data regression

Abstrak

Studi ini menganalisis hubungan antara dua aspek penting bagi pembangunan ekonomi, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) dan tingkat upah riil per jam di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel GLS-efek acak pada data Sakernas, Susenas, dan PDRB dalam kurun waktu 2002-2018 di 30 provinsi, ditemukan bahwa peningkatan TPAKP di Indonesia justru menyebabkan tingkat upah riil per jam menurun. Hal ini diduga terjadi karena mayoritas pekerja perempuan di Indonesia bekerja pada lapangan usaha yang memiliki tingkat produktivitas rendah sehingga membuat garis pasokan pekerja pada kurva penawaran tenaga kerja dan upah riil bergeser ke arah kanan yang bermakna terjadinya pergeseran titik upah riil ke tingkat yang lebih rendah. Penurunan tingkat upah riil per jam ini dialami baik oleh para pekerja perempuan maupun para pekerja laki-laki. Berdasarkan hasil temuan ini, maka studi ini merekomendasikan agar usaha peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebaiknya diikuti dengan ragam pekerjaan yang lebih bermutu bagi mereka. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi para perempuan khususnya pada lapangan usaha dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dan suatu kebijakan guna menghilangkan pelbagai hambatan kerja, baik berupa hambatan domestik maupun eksternal, yang kiranya dapat menghambat kesempatan masuknya para perempuan ke pasar tenaga kerja.

Kata kunci: tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, kurva penawaran tenaga kerja, upah riil per jam, regresi data panel

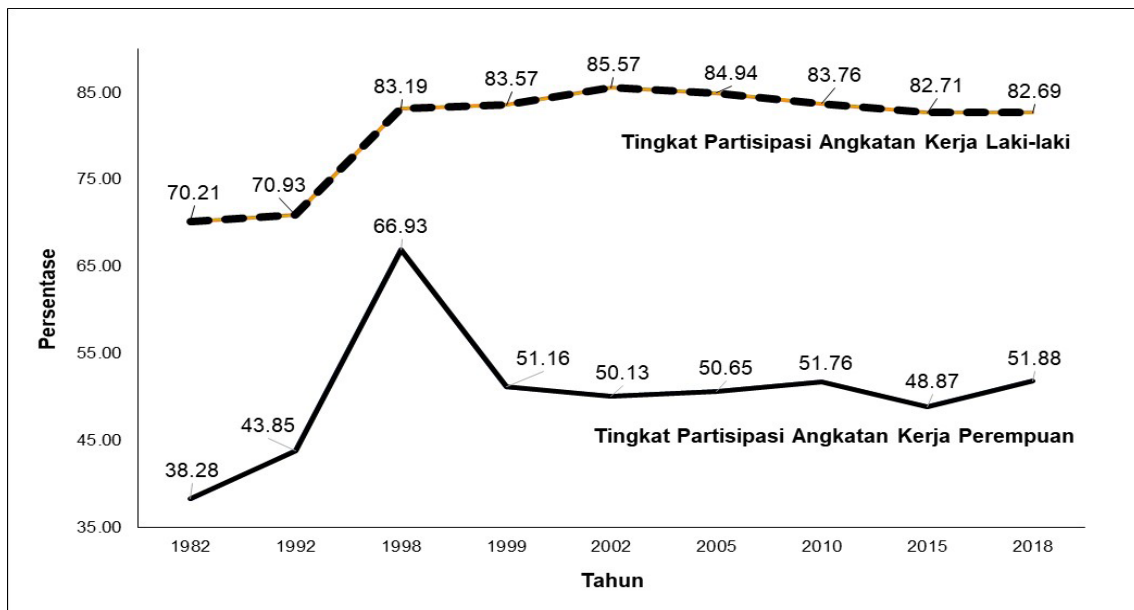
PENDAHULUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), yang menggambarkan persentase perempuan yang memasuki pasar kerja, merupakan salah satu indikator penting baik dalam hal fungsi produksi, pembangunan ekonomi suatu negara, maupun pembangunan berbasis gender (Cubas, 2016; Verme, 2014; Cascio et al., 2015). Sejak tahun 1960-an, secara umum, TPAKP di banyak negara telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Ma, 2014). Serupa dengan negara-negara tersebut, dalam 15 tahun terakhir tingkat TPAKP di Indonesia juga mengalami peningkatan dengan beberapa kondisi yang berfluktuasi.

Ketika krisis keuangan Asia melanda Indonesia pada tahun 1998, seiring dengan terpuruknya

perekonomian, tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia mengalami percepatan, khususnya TPAKP yang melambung tinggi (Gambar 1). Pada masa krisis, perempuan di Indonesia kemungkinan besar harus memasuki pasar kerja untuk menghidupi keluarga, bekerja di sektor informal, atau sebagai pekerja keluarga. Ketika krisis telah berlalu, trennya menurun drastis dan kemudian kembali meningkat seiring waktu. Namun, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia masih belum optimal, karena sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal sebagai tenaga kerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (Allen, 2016; Schaner & Das, 2016).

TPAKP menjadi hal penting untuk dianalisis karena diyakini TPAKP dapat menjadi penggerak dan/

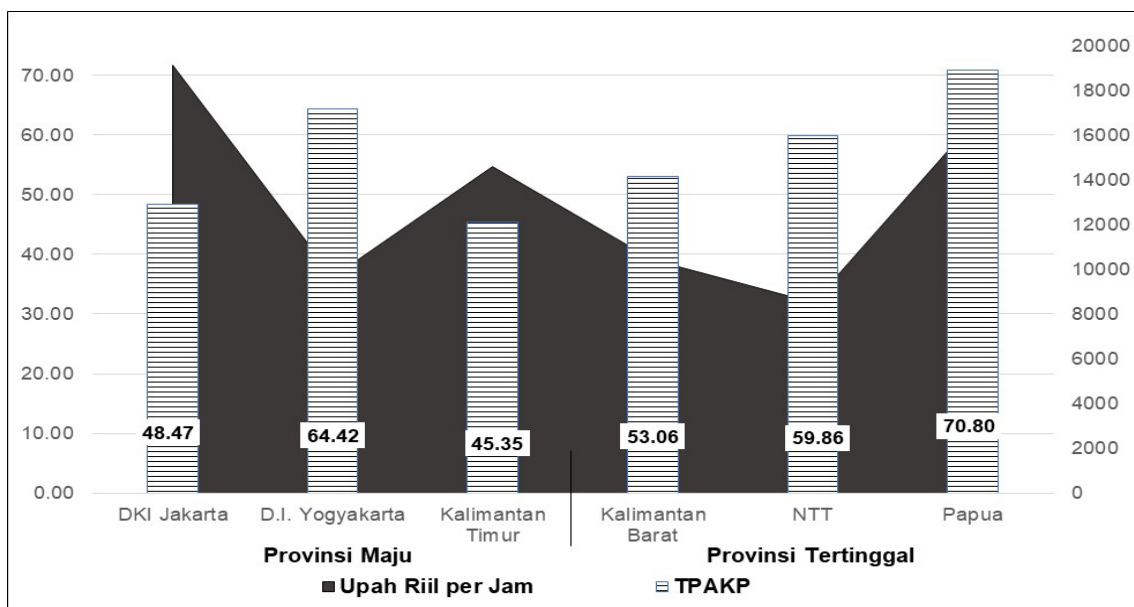


Sumber: BPS, 2020 (diolah)

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan di Indonesia Tahun 1982-2018

atau merupakan hasil dari pembangunan ekonomi (Verick, 2014). Hal ini bermakna bahwa secara teoritis terdapat dua fokus utama hubungan antara TPAKP dan pembangunan ekonomi, yaitu pengaruh pembangunan ekonomi terhadap tingkat TPAKP, dan/atau pengaruh TPAKP terhadap tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Di satu sisi, beberapa peneliti mengemukakan bahwa efek pembangunan ekonomi menunjukkan hubungan berbentuk U-terbalik (*U-shaped relationship*) pada TPAKP. Hubungan berbentuk U-terbalik bermakna bahwa pada awal pembangunan suatu negara, TPAKP masih rendah,

tetapi seiring meningkatnya level perekonomian, TPAKP juga ikut meningkat tajam dan pada suatu titik tertentu setelah terjadinya peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, TPAKP akan kembali menurun. Akan tetapi, Gaddis dan Klasen (2014) menemukan bahwa hubungan U-terbalik tersebut tidak lagi relevan dengan berbagai data di negara berkembang saat ini. Di sisi lainnya, Appiah (2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif TPAKP terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Sub-Sahara Afrika (SSA). Hassan & Rafaz (2017) juga menambahkan bahwa TPAKP dapat berpengaruh



Keterangan: Pengkategorian provinsi tertinggal dan provinsi maju didasarkan pada peringkat indeks pembangunan manusia.

Sumber: BPS, 2018 (diolah).

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Upah Riil per Jam, Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2018

dalam meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan infrastruktur, terutama di beberapa negara berkembang.

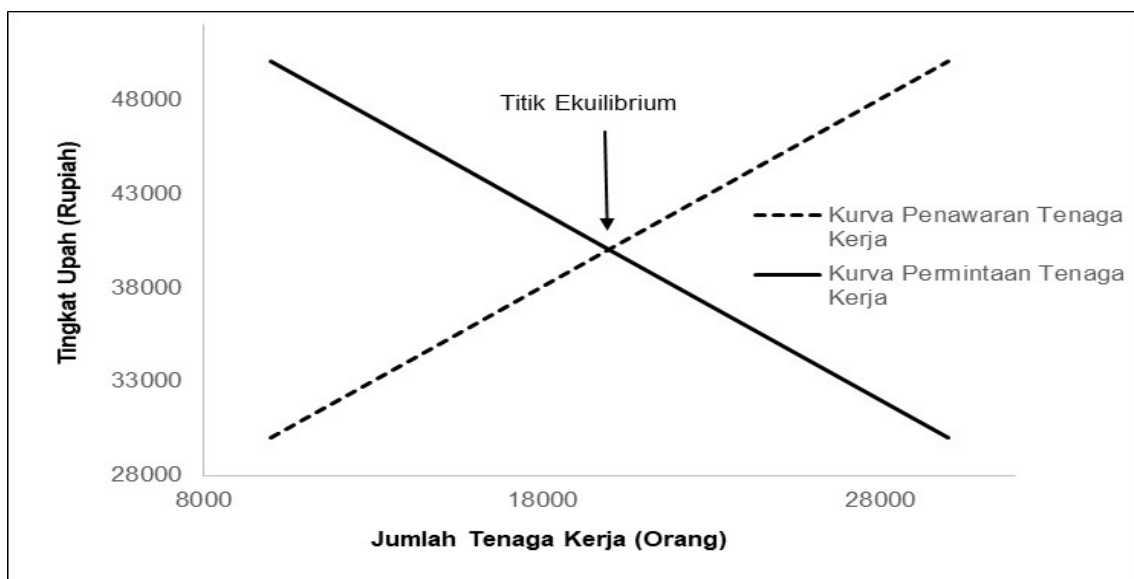
Menurut perspektif pekerja, pertumbuhan tingkat penyerapan pekerjaan (dalam konteks ini TPAKP) dan tingkat upah riil adalah dua aspek penting untuk pembangunan ekonomi (Pleic & Berry, 2009). Meskipun TPAKP di Indonesia terus mengalami peningkatan, World Bank (2019) menyebutkan bahwa tingkat upah riil di Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi. Di saat tingkat ketenagakerjaan umum meningkat 0,3 persen dari 63,6 persen (Agustus 2018) menjadi 63,9 persen (Agustus 2019), upah riil justru mengalami penurunan sebesar 3 persen (*y-o-y*).

Upah riil per jam pada beberapa provinsi di Indonesia dengan TPAKP yang cukup tinggi ternyata jauh lebih rendah bila dibandingkan upah riil per jam pada provinsi lainnya dengan TPAKP yang lebih rendah. Contohnya, pada tiga provinsi paling tertinggal di Indonesia, tingginya angka TPAKP tidak sejalan dengan level upah riil per jam (Gambar 2). Provinsi Papua yang merupakan provinsi dengan angka TPAKP tertinggi, yakni sebesar 70,80 persen memiliki tingkat upah riil per jam yang jauh lebih rendah daripada provinsi paling maju di Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan TPAKP hanya sebesar 48,47 persen (BPS, 2018). Perbedaan level TPAKP dan upah riil per jam ini memperkuat argumen tentang tingginya jumlah tenaga kerja berproduktivitas rendah di daerah tertinggal. Kondisi yang cukup berbeda antarprovinsi juga membuat studi ini yang menganalisis data pada level provinsi menjadi penting.

Para peneliti telah melakukan penelitian empiris untuk menjelaskan hubungan antara TPAKP dan

pertumbuhan upah riil. Acemoglu et al. (2004) yang meneliti efek TPAKP selama mobilisasi Perang Dunia (PD) II, menemukan bahwa semakin banyak perempuan memasuki pasar tenaga kerja selama PD II maka semakin rendah tingkat upah. Ia berargumen bahwa selama PD II, perempuan dipaksa memasuki pasar tenaga kerja karena pasokan tenaga kerja laki-laki menurun. Sebaliknya Weinstein (2017) menemukan bahwa setiap kenaikan sepuluh persen TPAKP dapat meningkatkan upah riil sebesar lima persen di wilayah metropolitan Amerika Serikat. Meningkatnya tingkat TPAKP dalam situasi ini membawa efek kualitatif pada perekonomian karena para pekerja tersebut berkontribusi sebagai pekerja yang produktif dan efisien. Jadi, semakin tinggi TPAKP, semakin tinggi pula tingkat upahnya. Flabbi et al. (2019) juga menemukan bahwa perempuan pada posisi CEO dapat membantu meningkatkan tingkat upah sebesar 10 persen bagi para pekerja perempuan pada posisi 25 persen jabatan tertinggi di suatu perusahaan, namun sayangnya juga menurunkan tingkat upah sebesar 3 persen pada pekerja perempuan yang berada pada posisi 25 persen jabatan terendah.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi pekerja perempuan pada industri yang lebih produktif, pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum untuk perempuan dalam jabatan parlementer. Kebijakan ini utamanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah pekerja perempuan pada posisi jabatan tinggi. Melalui kebijakan ini, diharapkan minimum 30 persen kursi jabatan parlementer di setiap daerah dapat diduduki oleh para perempuan sebagai bentuk pembangunan berbasis gender. Adanya kebijakan ini, seharusnya



Sumber: Borjas, 2016.

Gambar 3. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

dapat mengurangi perbedaan kontradiktif antara TPAKP dan upah riil per jam, khususnya setelah kebijakan ini diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2008.

Melihat permasalahan umum dan spesifik yang telah dijelaskan di atas, maka menjadi penting untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan TPAKP terhadap pertumbuhan upah riil di era modern perekonomian Indonesia. Selain itu, penelitian tentang hubungan antara kenaikan TPAKP dengan penurunan upah riil di Indonesia belum banyak dilakukan. Dengan menggunakan data panel Sakernas yang mencakup 30 provinsi selama periode tahun 2002-2018, studi ini akan mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan tingkat TPAKP dengan upah riil di Indonesia.

Untuk mengkaji pengaruh TPAKP terhadap pertumbuhan upah riil di Indonesia, beberapa teori tentang kurva penawaran tenaga kerja dan teori upah akan dibahas sebagai dasar kerangka teori dalam penelitian ini. *Pertama*, Borjas (2016) menjelaskan tentang kurva penawaran tenaga kerja dan menunjukkan bagaimana kurva tersebut dapat bergeser dalam beberapa kondisi, termasuk perubahan TPAKP. Implementasi teori tersebut dijelaskan dengan menggunakan hasil penelitian Acemoglu et al. (2004) dan Weinstein (2017). *Kedua*, untuk mengeksplorasi hubungan matematis antara TPAKP dan perubahan upah, penelitian ini menggunakan teori makroekonomi Mankiw (2013) dan teori ketenagakerjaan McConnell et al. (2017).

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. Pada sisi penawaran, penawaran tenaga kerja dapat meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, tetapi pada sisi permintaan, seiring dengan kenaikan tingkat upah, permintaan akan tenaga kerja menurun. Pada titik ekuilibrium, garis penawaran dan garis permintaan bertemu, menunjukkan kondisi keseimbangan, sehingga titik ekuilibrium menunjukkan jumlah pekerja pada tingkat pendapatan tertentu.

Titik ekuilibrium dapat mengalami pergeseran baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Pergeseran titik ekuilibrium bermakna bahwa ada perubahan pada level upah maupun pada level jumlah tenaga kerja. Penelitian ini secara khusus meneliti hubungan antara TPAKP, sebagai indikator jumlah tenaga kerja, dan upah riil dari sisi penawaran tenaga kerja, sehingga setiap perubahan TPAKP hanya akan menggeser garis pada sisi penawaran. Gambar 4 menjelaskan pergeseran titik ekuilibrium saat kurva penawaran tenaga kerja bergeser dalam dua kemungkinan kondisi.

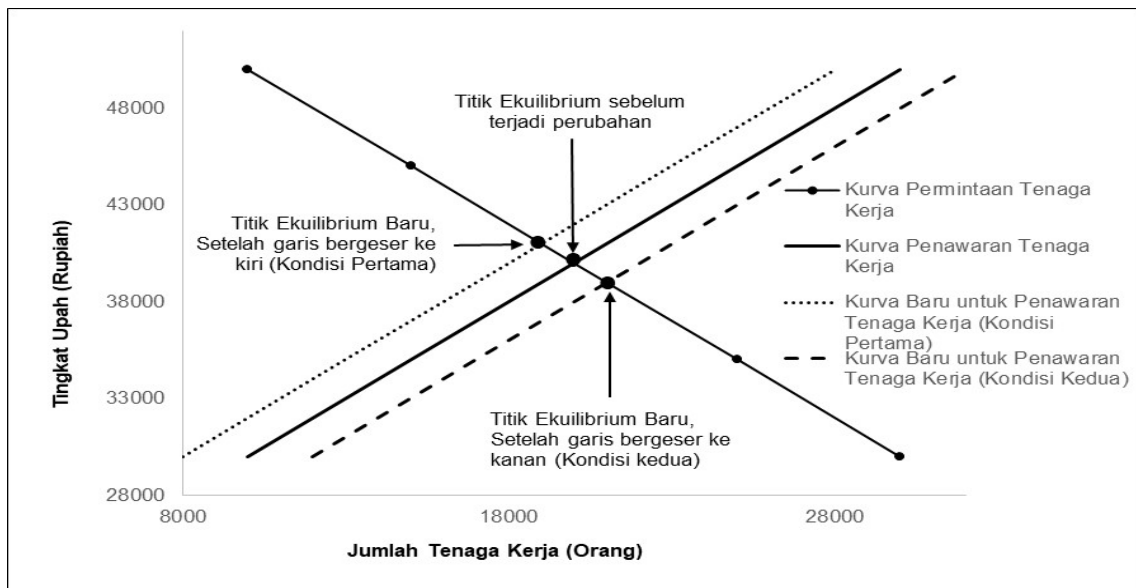
Kondisi pertama (lihat garis titik-titik/garis kondisi pertama pada Gambar 4) terjadi ketika garis penawaran bergeser ke kiri dan menciptakan

titik keseimbangan baru, yang menyiratkan bahwa ketika total tenaga kerja meningkat, upah pada titik ekuilibrium juga meningkat. Weinstein (2017) secara empiris membuktikan bahwa setiap kenaikan TPAKP 10 persen dapat menaikkan upah sebesar lima persen. Dia berpendapat bahwa perempuan memasuki pasar kerja atas keinginan mereka sehingga partisipasi mereka mungkin memengaruhi produktivitas secara positif.

Kondisi kedua (lihat garis putus-putus/garis kondisi kedua pada Gambar 4) terjadi ketika kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan, menciptakan garis penawaran tenaga kerja baru sehingga ekuilibrium baru memiliki tenaga kerja yang lebih besar dengan tingkat upah yang lebih rendah. Acemoglu et al. (2004) menemukan bahwa situasi ini terjadi di Amerika Serikat selama PD II. Pada saat itu, laki-laki harus meninggalkan pasar tenaga kerja untuk memasuki perang, pendapatan rumah tangga turun, dan situasi ini memaksa lebih banyak perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Namun, karena tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan merupakan substitusi yang tidak sempurna, jumlah TPAKP yang lebih besar tersebut justru menurunkan tingkat upah tenaga kerja. Artinya, ketika pasar tenaga kerja memaksa perempuan yang tidak siap untuk memasuki pasar, partisipasi mereka dapat mengurangi upah tenaga kerja. Dengan menggunakan hipotesis bahwa tren peningkatan tenaga kerja perempuan terjadi karena adanya pergeseran pada sisi penawaran, diperoleh hasil bahwa hal tersebut merupakan penyebab turunnya upah di pasar tenaga kerja Amerika Serikat pada saat itu. Hipotesis baru tentang tren peningkatan kondisi pekerja wanita di Amerika Serikat ini telah dibuktikan pula oleh Bellou & Cardia (2018).

Dalam aplikasinya di Indonesia, Noveda et al. (2015) melakukan penelitian terhadap data Provinsi Sumatera Barat. Mereka menunjukkan bahwa terdapat pengaruh upah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terhadap penawaran tenaga kerja. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa kondisi penurunan pasokan tenaga kerja secara simultan dengan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja dapat menurunkan tingkat upah.

Selain teori pergeseran kurva penawaran, pengaruh ketimpangan upah akibat dari semakin tingginya pasokan tenaga kerja perempuan sehingga menyebabkan turunnya upah juga telah ditemukan oleh beberapa penelitian. Jahnke (1998) menemukan bahwa upah dapat menurun pada level tertentu pada saat tenaga kerja meningkat yang disebabkan oleh dua hal utama, yaitu (1) pasokan tenaga kerja yang melimpah dan (2) ketimpangan upah. Mawadah (2017) juga mengungkapkan bahwa kurva penawaran



Sumber: Ilustrasi penulis dari berbagai literatur.

Gambar 4. Titik Ekuilibrium Baru Setelah Kurva Penawaran Tenaga Kerja Bergeser di Bawah Dua Kondisi

tenaga kerja yang berkaitan dengan pembayaran upah dan jam kerja dalam kondisi normal tidak sesuai dengan kondisi pekerja perempuan di Indonesia. Menurutnya, kurva penawaran harus lebih relevan dalam menggambarkan hubungan antara jam kerja, upah, dan perempuan, baik untuk pekerja profesional maupun ibu rumah tangga.

Selanjutnya, pembahasan dari fungsi produksi dalam ilmu ekonomi menunjukkan bahwa setiap perubahan partisipasi tenaga kerja sebagai penawaran tenaga kerja dapat memengaruhi upah. Pembuktian matematisnya diawali dari fungsi produksi menurut Mankiw (2013):

$$Y = F(K, L) \dots \dots \dots (1)$$

di mana *output* industri merupakan fungsi dari beberapa modal fisik (*capital*/K) dan tenaga kerja (*labour*/L). Dengan asumsi bahwa fungsi di atas mengikuti Cobb-Dougllass, persamaan (1) menjadi:

$$Y = F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha} \dots \dots \dots (2)$$

di mana A lebih besar dari nol sebagai produktivitas teknologi, dan $0 < \alpha \leq 1$. Jika kita menurunkan persamaan (2) sehubungan dengan tenaga kerja (L), kita bisa mendapatkan fungsi produktivitas marginal tenaga kerja (*marginal productivity of labour* /MPL) sebagai berikut:

$$MPL = (1 - \alpha) = AK^\alpha L^{-\alpha} \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan (3) di atas merupakan fungsi upah (*wage*/W) tenaga kerja yang dapat menunjukkan pengaruh variabel kemajuan teknologi (A), variabel tenaga kerja (L) dan variabel modal (K) terhadap besaran upah. Mengubah persamaan (3) dengan menggunakan persamaan (2), menjadi:

$$\begin{aligned} W &= (1 - \alpha)AK^\alpha L^{-\alpha} \cdot \frac{L}{L} \\ &= \frac{(1 - \alpha)AK^\alpha L^{1-\alpha}}{L} \\ &= \frac{(1 - \alpha)Y}{L} \dots \dots \dots (4) \end{aligned}$$

Selain itu, untuk menyederhanakan, penelitian ini menggunakan logaritma natural dari persamaan (4), menjadi:

$$\ln W = \ln(1 - \alpha) + \ln Y - \ln L \dots \dots \dots (5)$$

Persamaan (5) menunjukkan bahwa fungsi pertumbuhan upah merupakan fungsi dari pertumbuhan produksi (Y). Penelitian ini menggunakan laju pertumbuhan PDRB sebagai indikator pertumbuhan produksi dan pertumbuhan tenaga kerja (L), dengan koefisien konstanta $\ln(1 - \alpha)$.

Variabel utama tersebut memiliki tanda berbeda, di mana pertumbuhan PDRB bertanda positif dan pertumbuhan tenaga kerja bertanda negatif. Persamaan ini menguatkan teori tentang efek berbeda dari dua kondisi terhadap pertumbuhan upah. Di satu sisi, ketika pertumbuhan PDRB lebih besar dari pertumbuhan tenaga kerja, maka pertumbuhan upah memiliki kemungkinan untuk meningkat. Sebaliknya, jika PDRB tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan tenaga kerja, maka pertumbuhan upah akan menurun.

Terkait dengan variabel tenaga kerja yang disebutkan dalam persamaan (5), McConnell et al. (2017) menegaskan bahwa terdapat dua aspek variabel ketenagakerjaan, yaitu kuantitas tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Kuantitas tenaga kerja adalah tingkat ketenagakerjaan atau tingkat partisipasi tenaga kerja. Penelitian ini secara khusus

menggunakan TPAKP sebagai ukuran kuantitas tenaga kerja tersebut. Kualitas tenaga kerja sendiri, yaitu aspek *human capital*, bersifat lebih kompleks karena memasukkan berbagai variabel. Banyak penelitian menunjukkan pengaruh modal manusia terhadap upah tenaga kerja. Misalnya, Allen (2016, hlm. 26) menyatakan bahwa di Indonesia, “pekerja dengan pendidikan tinggi memiliki upah yang lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan upah yang lebih tinggi daripada pekerja yang kurang berpendidikan”. Membagi variabel tenaga kerja dengan dua jenis aspek tenaga kerja, persamaan (5) di atas menjadi:

$$\ln W = \ln(1 - \alpha) + \ln Y - \ln L_{quantity} + \ln L_{quality} \dots\dots (6)$$

Persamaan (6) membuktikan bahwa fungsi upah merupakan fungsi dari pertumbuhan PDRB (Y), pertumbuhan kuantitas tenaga kerja ($L_{quantity}$), dan pertumbuhan kualitas tenaga kerja ($L_{quality}$), dengan koefisien konstan $(1-\alpha)$. Pada persamaan (6) ini, variabel kuantitas tenaga kerja masih menggunakan tanda negatif sebagaimana penjelasan pada persamaan (5). Sementara itu, variabel kualitas tenaga kerja pada persamaan (6) menggunakan tanda positif atas dasar teori upah premium/collage wage premium theory (McConnell et al., 2017). Teori ini menyakan bahwa pertumbuhan kualitas tenaga kerja secara teoritis berpengaruh positif terhadap pertumbuhan upah.

Ada beberapa variabel yang digunakan sebagai proksi kualitas tenaga kerja. Di satu sisi, McConnell et al. (2017) dalam bukunya menulis bahwa “modal manusia terdiri dari akumulasi investasi sebelumnya dalam pendidikan, pelatihan di tempat kerja, kesehatan, dan faktor lain yang meningkatkan produktivitas.” Di sisi lain, Agénor & Canuto (2015) menunjukkan 4 faktor sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, infrastruktur publik, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol tambahan sebagai bagian dari aspek modal manusia yaitu rata-rata lama sekolah sebagai proksi pendidikan dan angka harapan hidup sebagai proksi kesehatan. Sebagai tambahan dari aspek sosial ekonomi provinsi, studi ini juga menggunakan angka kemiskinan sebagai variabel kontrol tambahan lainnya. Hasil penelitian Haq & Amin (2017) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dapat mendorong perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya dengan cara memasuki pasar tenaga kerja.

Berdasarkan tujuan utama yang dikemukakan sebelumnya, terdapat hipotesis bahwa TPAKP secara signifikan memberi pengaruh negatif terhadap pertumbuhan upah riil Indonesia. Hipotesis

ini mendukung argumen bahwa perempuan di Indonesia memasuki pasar kerja tanpa kesiapan yang baik. Berbagai tekanan situasi memaksa perempuan untuk memasuki pasar kerja, yang ditunjukkan dengan tingkat TPAKP yang lebih tinggi di provinsi yang kurang berkembang, dan sebaliknya.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan dua variabel utama, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) dan pertumbuhan upah riil per jam, dengan empat variabel kontrol. Pertumbuhan upah riil per jam (dalam bentuk logaritma) dalam penelitian ini diartikan sebagai pertumbuhan upah tanpa memperhatikan harga saat ini. Selain itu, terdapat empat variabel kontrol yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, dalam bentuk logaritma), rata-rata lama sekolah (dalam tahun) sebagai proksi pendidikan, angka harapan hidup (dalam tahun) sebagai proksi kesehatan, dan angka kemiskinan (dalam bentuk persentase) sebagai indikator sosial ekonomi provinsi. Tabel 1 menampilkan definisi, bentuk, dan sumber dari semua variabel yang digunakan.

Setiap variabel pada penelitian ini akan menggunakan beberapa bentuk data, dan beberapa di antaranya akan diolah dengan beberapa langkah pengolahan tambahan, seperti penggantian tahun dasar atau *rebasing* dan penggunaan deflator. Terkait bentuk data, variabel upah riil per jam dan PDRB, akan menggunakan bentuk logaritma, sementara untuk variabel TPAKP dan angka kemiskinan menggunakan format persentase, dan untuk rata-rata tahun sekolah dan angka harapan hidup menggunakan format tahun. Pengolahan tambahan dilakukan pada data upah riil per jam dan PDRB. Data upah nominal per jam, yang diperoleh dari pengolahan data mentah sakernas, diubah menjadi upah riil per jam dengan menggunakan deflator indeks harga konsumen. Penggantian tahun dasar atau *rebasing* akan dilakukan pada deflator indeks harga konsumen (IHK) maupun data PDRB, karena kedua data tersebut memiliki dua tahun dasar yang berbeda pada periode tahun 2002-2018.

Metode Analisis

Dengan menggunakan regresi data panel dengan variabel *dummy*, analisis akan dilakukan untuk 30 provinsi di Indonesia dari tahun 2002-2018. Karena jumlah provinsi di Indonesia meningkat akibat kebijakan desentralisasi, maka akan dilakukan pengelompokan data untuk beberapa provinsi yang terbentuk terakhir, yaitu dari 34 provinsi menjadi 30 provinsi (berdasarkan kondisi tahun 2002).

Tabel 1. Definisi Variabel dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian Ini

Nama Variabel	Bentuk	Definisi	Sumber Data
Upah riil per jam	Logaritma Natural	Upah bersih atau gaji yang diterima pekerja untuk jangka waktu 1 bulan dibagi total jam kerja (total jam kerja minggu lalu dan total jam kerja reguler 3 minggu), disesuaikan dengan deflator (menggunakan indeks harga konsumen). Data untuk laki-laki dan perempuan.	Sakernas, BPS.
PDRB (2010=100)	Logaritma Natural	Total <i>output</i> ekonomi di provinsi dibagi jumlah penduduk, disesuaikan dengan inflasi.	Publikasi tahunan PDRB, BPS.
TPAKP	Persentase	Persentase perempuan berusia 15 tahun ke atas yang dalam seminggu sebelumnya bekerja, sementara tidak bekerja, tetapi memiliki pekerjaan, atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau dalam proses membangun baru bisnis.	Publikasi tahunan situasi angkatan kerja di Indonesia, BPS.
Rata lama sekolah	Tahun	Jumlah rata-rata tahun menyelesaikan pendidikan dari populasi berusia 25 tahun dan lebih, tidak termasuk tahun yang dihabiskan untuk mengulang nilai individu. Data untuk laki-laki dan perempuan.	Publikasi tahunan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, BPS.
Angka Harapan Hidup	Tahun	Jumlah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Data untuk laki-laki dan perempuan.	Publikasi tahunan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, BPS.
Tingkat kemiskinan	Persentase	Persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data untuk laki-laki dan perempuan.	Publikasi data dan informasi kemiskinan, BPS.

Sumber: Definisi yang disusun penulis, dari beberapa literatur.

Untuk memberikan bukti empiris, penelitian ini menggunakan model regresi panel data (Wooldridge, 2010) sebagai berikut:

$$\ln W_{it} = \theta + \beta_1 \ln RGDP_{it} + \beta_2 FLFP_{it} + \beta_3 MYS_{it} + \beta_4 AHH_{it} + \beta_5 POV_{it} + \delta_2 id_{2t} + \dots + \delta_{30} id_{30t} + u_{it} \dots \dots \dots (7)$$

Di mana:

- W_{it} : upah riil per jam (laki-laki dan perempuan) di provinsi i pada tahun t
- $RGDP_{it}$: produk domestik bruto regional per kapita di provinsi i pada tahun t
- $FLFP_{it}$: partisipasi angkatan kerja perempuan di provinsi i pada tahun t
- MYS_{it} : rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan) di provinsi i tahun t
- AHH_{it} : angka harapan hidup (laki-laki dan perempuan) di provinsi i tahun t
- POV_{it} : angka kemiskinan atau persentase rumah tangga miskin (laki-laki dan perempuan) di provinsi i pada tahun t

- i : provinsi
- t : tahun
- u_{it} : kesalahan dalam model di provinsi i pada tahun t
- θ : konstanta pada model
- β_1 : elastisitas PDRB terhadap upah riil per jam
- β_2 : elastisitas TPAKP terhadap upah riil per jam
- β_3 : kontribusi marjinal rata-rata tahun sekolah terhadap upah riil per jam
- β_4 : kontribusi marjinal rata-rata tahun angka harapan hidup terhadap upah riil per jam
- β_5 : elastisitas angka kemiskinan terhadap upah riil per jam
- $id_2, id_3, \dots, id_{30}$: variabel *dummy* untuk 30 provinsi
- $\delta_2, \delta_3, \dots, \delta_{30}$: konstanta tambahan untuk setiap provinsi berdasarkan variabel *dummy*

Model ini menambahkan 29 variabel *dummy* ($id_2, id_3, \dots, id_{30}$) untuk 30 provinsi di Indonesia, dan provinsi pertama adalah provinsi acuan

(dalam penelitian ini menggunakan Provinsi Aceh). Penggunaan variabel *dummy* pada penelitian ini dikarenakan terdapat variasi data yang cukup besar data antarprovinsi, sehingga penting untuk mengontrol pengaruh perbedaan antarwilayah. Secara umum, koefisien variabel *dummy* adalah nilai tambahan untuk konstanta ($\delta_2, \delta_3, \dots, \delta_{30}$). Misalnya, untuk provinsi kedua, konstantanya adalah $\theta + \delta_2$. Akan tetapi, karena variabel dependen menggunakan bentuk logaritma natural, interpretasi koefisien variabel *dummy* akan berbeda. Wooldridge

(2016) menyatakan bahwa pengaruh masing-masing *dummy* akan menjadi $100 * [\exp(\delta_2) - 1]$, di mana nilai δ_2 bisa negatif atau positif.

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Data

Studi ini menggunakan data TPAKP dan upah riil per jam sebagai variabel utama, dengan beberapa data sebagai variabel tambahan. TPAKP yang merupakan angka persentase disandingkan dengan data upah riil per jam yang dilogartmakan sehingga

Tabel 2. Data Hasil Olah menurut Provinsi dan Variabel, Indonesia, 2018

Provinsi	Variabel					
	Upah Riil per Jam (Rp)	PDRB per Kapita (Ribu Rp)	TPAKP (Persen)	Rata Lama Sekolah (Tahun)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tingkat Kemiskinan (Persen)
DKI Jakarta	19.100,13	165.863,77	48,47	11,05	72,67	3,57
Kalimantan Timur	14.600,31	103.366,82	46,01	9,48	73,96	6,18
Riau	13.446,53	73.259,40	45,79	8,92	71,19	7,11
Papua	16.535,13	51.686,22	66,79	6,52	65,36	26,7
Jambi	10.827,81	40.051,65	51,95	8,23	70,89	7,92
Jawa Timur	9.402,70	39.587,92	55,43	7,39	70,79	10,98
Bali	11.801,63	35.914,21	70,41	8,65	71,68	4,01
Kep. Bangka Belitung	11.352,74	35.764,82	50,19	7,84	70,18	5,25
Sumatera Selatan	9.810,11	35.580,02	53,56	8,00	69,41	12,80
Sumatera Utara	9.550,49	35.570,71	59,97	9,34	68,61	9,22
Kalimantan Tengah	13.247,08	35.559,51	51,94	8,37	69,64	5,17
Sulawesi Tengah	9.994,11	34.419,91	53,92	8,52	67,78	14,01
Banten	13.770,58	34.191,75	44,93	8,62	69,64	5,24
Sulawesi Utara	12.523,69	33.915,22	45,26	9,24	71,26	7,80
Sulawesi Selatan	11.299,79	33.613,37	47,99	8,02	70,08	9,35
Median (diurutkan berdasarkan PDRB)	10.578,83	33.449,50	52,51	8,44	70,18	9,29
Sulawesi Tenggara	11.597,45	33.285,62	55,97	8,69	70,72	11,63
Kalimantan Selatan	11.691,76	30.627,71	55,52	8,00	68,23	4,54
Sumatera Barat	10.244,05	30.470,63	54,53	8,76	69,01	6,65
Jawa Barat	12.731,89	29.161,39	42,37	8,15	72,66	7,45
Lampung	8.756,71	27.742,03	51,49	7,82	70,18	13,14
Jawa Tengah	8.412,21	27.290,82	56,41	7,35	74,18	11,32
Kalimantan Barat	10.404,04	26.108,13	53,06	7,12	70,18	7,77
DI Yogyakarta	9.666,68	25.776,98	64,42	9,32	74,82	12,13
Aceh	10.600,38	24.013,81	48,56	9,09	69,64	15,97
Gorontalo	8.663,98	22.915,38	51,31	7,46	67,45	16,81
Bengkulu	9.635,18	22.498,43	56,15	8,61	68,84	15,43
Maluku Utara	10.557,29	20.322,46	49,79	8,72	67,80	6,64
Nusa Tenggara Barat	8.731,93	18.015,32	54,25	7,03	65,87	14,75
Maluku	10.546,53	16.611,66	49,60	9,58	65,59	18,12
Nusa Tenggara Timur	8.516,59	12.276,12	59,86	7,30	66,38	21,35

Sumber: BPS, 2020 (diolah).

Tabel 3. Korelasi antarvariabel Independen

	<i>Ln</i> PDRB per Kapita	TPAKP	Rata Lama Sekolah	Angka Harapan Hidup	Tingkat Kemiskinan
<i>Ln</i> PDRB per Kapita	1,00				
TPAKP	-0,21	1,00			
Rata Lama Sekolah	0,50	-0,27	1,00		
Angka Harapan Hidup	-0,08	-0,01	-0,07	1,00	
Tingkat Kemiskinan	-0,43	0,21	-0,55	-0,06	1,00

Sumber: BPS, 2020 (diolah).

menggambarkan angka pertumbuhannya. Berikut paparan analisis deskriptif dari beberapa jenis data yang digunakan.

Dilihat dari nilai PDRB, dapat dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, merupakan provinsi yang paling berkembang di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai upah riil per jam tertinggi, PDRB per kapita terbesar, rata-rata lama sekolah terlama, tingkat kemiskinan terendah, angka harapan hidup di atas nilai median, dan tingkat TPAKP yang lebih rendah dari nilai median. Sebaliknya, kita dapat menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang paling tertinggal berdasarkan data yang digunakan, dengan PDRB per kapita terendah, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang lebih rendah dari nilai median, upah riil per jam terendah setelah Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan tertinggi, dan tingkat TPAKP yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai median.

Terkait data TPAKP dan upah riil per jam tahun 2018, variasi antarprovinsi cukup besar. Nilai TPAKP terendah sekitar 42,37 persen (Provinsi Jawa Barat), nilai tertinggi 70,41 persen (Provinsi Bali), dengan standar deviasi 6,45 persen. Dalam hal upah riil per jam, nilai tertinggi adalah Rp19.100,13 (Provinsi DKI Jakarta), nilai terendah Rp8.412,21 (Provinsi Jawa Tengah), dengan standar deviasi Rp2.446,17. Variasi ini mendukung argumen untuk memasukkan variabel *dummy* provinsi dalam penelitian ini untuk mengontrol pengaruh perbedaan antarprovinsi dalam model.

Terkait pola hubungan antarvariabel bila dilihat menggunakan data olah deskriptif, terlihat pola hubungan yang berbeda (1) antara variabel upah riil per jam dan PDRB per kapita, dan (2) antara variabel rata-rata tahun sekolah dan tingkat kemiskinan. Jika suatu provinsi memiliki nilai upah riil per jam yang tinggi, provinsi tersebut juga memiliki PDRB per kapita yang tinggi. Selanjutnya, jika suatu provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, provinsi tersebut juga memiliki rata-rata lama sekolah yang tinggi (Tabel 2). Pola hubungan pada kondisi pertama dapat dikatakan baik karena salah satu variabelnya

(upah riil per jam) adalah variabel dependen, dan variabel lainnya adalah variabel independen. Sebaliknya, pola hubungan pada kondisi kedua bisa dikatakan sebagai indikasi yang tidak baik karena kedua variabel tersebut adalah variabel independen. Korelasi yang kuat antarvariabel independen dapat menimbulkan masalah multikolinieritas dalam model. Untuk menjawab keraguan terhadap indikasi adanya korelasi yang kuat antarvariabel independen, penelitian ini menampilkan tabel korelasi untuk semua variabel independen yang digunakan.

Beberapa literatur menyatakan bahwa jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,70 maka variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. Korelasi yang kuat akan membuat salah satu variabel tersebut menjadi tidak signifikan dalam proses estimasi regresi. Di antara variabel independen dalam penelitian ini, semua koefisien korelasi bernilai lebih rendah dari 0,70 (Tabel 3) sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen tersebut tidak berkorelasi kuat.

Hasil Analisis Data

Hasil pengolahan inferensial menggunakan regresi panel model dengan efek acak (Tabel 4) menunjukkan bahwa TPAKP secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan upah riil per jam di Indonesia. Dengan tingkat signifikan $\alpha = 5$ persen, studi ini menemukan bahwa setiap tambahan 1 persen pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan akan menurunkan upah riil per jam sebesar 0,01 persen, *ceteris paribus*. Efek penurunan upah riil per jam ini tidak hanya dialami oleh para pekerja perempuan, tetapi mencakup upah riil per jam semua pekerja, termasuk pekerja laki-laki.

Temuan ini sejalan dengan kerangka teori yang dibangun oleh studi ini, yang mendukung beberapa argumen, yaitu *pertama*, bahwa perempuan di Indonesia memasuki pasar kerja pada industri yang rendah level produktivitasnya. Fokus utama dalam penelitian ini mengemukakan bahwa peningkatan kesetaraan gender di Indonesia, dalam hal ini berupa peningkatan persentase perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja, masih jauh dari suatu indikasi

Tabel 4. Hasil Olah Regresi Panel GLS-Efek Acak (*Random-Effect GLS Regression*)

Variabel	Simbol	Tanda Koefisien yang Diharapkan	Nilai Koefisien	P > z
Variabel Dependen: Ln Upah Riil per Jam				
Ln PDRB per kapita		Positif	0,67	0,00
TPAKP (persen)		Negatif	-0,01	0,00
Rata Lama Sekolah (tahun)		Positif	0,18	0,00
Angka Harapan Hidup (tahun)		Positif	0,00	0,28
Tingkat kemiskinan (Persen)		Negatif	-0,07	0,00
Nilai konstanta		-	2,40	0,01
Nilai R ²	0,77 ¹			
Nilai prob. > chi ²	0,00 ²			
Jumlah obsevasi	510			
Jumlah kelompok	30			
Periode penelitian	17			
α	5%			

Sumber: BPS, 2020 (diolah).

pembangunan yang baik. Fakta bahwa tingkat TPAKP yang lebih tinggi sebagian besar terjadi di provinsi-provinsi yang kurang berkembang menunjukkan bahwa perempuan di wilayah tersebut bekerja di industri dengan produktivitas yang lebih rendah. Kondisi ini membuat sisi penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan (lihat Gambar 2 dan garis hitam pada Gambar 4). *Kedua*, berbagai tekanan situasi memaksa perempuan untuk memasuki pasar kerja tanpa kualifikasi dan persiapan yang baik. Rendahnya level pendidikan, khususnya pada provinsi tertinggal, membuat tenaga kerja perempuan harus bekerja pada

sektor informal dan atau menduduki posisi pekerja rendah seperti pekerja buruh lepas. Tanggung jawab dalam rumah tangga berupa pekerjaan domestik rumahtangga juga diduga membuat perempuan harus bekerja dengan jam kerja rendah, yang tentu saja bermuara pada level upah yang lebih rendah.

Selain temuan utama tersebut, 3 dari 4 variabel kontrol lainnya juga bersesuaian dengan teori yang digunakan, sementara satu variabel kontrol lainnya tidak signifikan dalam model. *Pertama*, PDRB per kapita secara signifikan dapat meningkatkan upah riil per jam. Dengan tingkat signifikan $\alpha=5$ persen maka dapat disimpulkan bahwa ketika PDRB per kapita di suatu provinsi meningkat sebesar 1 persen maka upah riil per jam di provinsi tersebut juga akan meningkat sebesar 0,67 persen, *ceteris paribus*. *Kedua*, sebagai proksi dari aspek *human capital*, variabel rata-rata lama sekolah sebagaimana yang diharapkan membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan upah riil per jam di Indonesia. Jika rata-rata lama sekolah penduduk di suatu provinsi dapat ditingkatkan satu tahun maka upah riil per jam di provinsi tersebut dapat meningkat sebesar 17,90 persen, *ceteris paribus*. *Ketiga*, sebagai proksi kondisi social ekonomi suatu provinsi, dengan tingkat signifikan $\alpha=5$ persen, hasil olah regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam tingkat kemiskinan dapat menurunkan upah riil per jam sebesar 0,07 persen, *ceteris paribus*. Efek negatif tingkat kemiskinan ini terhadap upah riil per jam ini lebih besar daripada efek TPAKP. Pada studi ini, variabel angka harapan hidup yang merupakan proksi kesehatan dari aspek modal manusia atau kualitas tenaga kerja ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan upah riil per jam.

¹ Hasil oleh data menunjukkan bahwa regresi panel dengan efek acak memberikan hasil yang lebih baik dalam memperlihatkan pengaruh utama TPAKP terhadap upah riil per jam dan pengaruh variabel independen lainnya. Selain menguji hipotesis untuk menjawab setiap pertanyaan dalam penelitian ini, pertama-tama penelitian ini menganalisis koefisien keseluruhan R² untuk melihat seberapa baik model yang dibangun dalam menggambarkan pengaruh penuh variabel independen terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan R² sebesar 0,77 (Tabel 4), mengimplikasikan bahwa model regresi dengan keempat variabel independen tersebut dapat menggambarkan model upah riil per jam di Indonesia untuk analisis tingkat provinsi dari tahun 2002-2018 sebesar 77 persen. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

² Hasil olah regresi dalam penelitian menunjukkan adanya pengaruh simultan dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen, Ln upah riil per Jam. Karena nilai Prob > chi² adalah nol, maka hipotesis nol yang menyatakan semua variabel independen tidak signifikan dalam model ditolak sehingga semua variabel independen signifikan secara simultan dalam model, dan setidaknya satu parameter dari semua variabel independen tidak bernilai nol. Dengan tingkat signifikansi 5%, dari lima variabel independen yang digunakan, tiga variabel berpengaruh positif sedangkan variabel lainnya berpengaruh negatif terhadap upah riil per jam.

Tabel 5. Hasil Olah Regresi Panel Efek Random untuk Variabel *Dummy*

Provinsi	Koef. <i>Dummy</i>	Persentase Efek	Provinsi	Koef. <i>Dummy</i>	Persentase Efek
Aceh	(Provinsi Rujukan)		Bali	-0,85	-57,26
Sumatera Utara	-0,78	-54,16	Nusa Tenggara Barat	0,47	60,00
Sumatera Barat	-,071	-6,85	Nusa Tenggara Timur	0,79	120,34
Riau	-1,25	-71,35	Kalimantan Barat	(insig) -0,25	-22,12
Jambi	-0,76	-53,23	Kalimantan Tengah	-0,75	-52,76
Sumatera Selatan	-0,33	-28,11	Kalimantan Selatan	-0,75	-52,76
Bengkulu	(insig) 0,35	41,91	Kalimantan Timur	-1,69	-81,55
Lampung	-0,26	-22,89	Sulawesi Utara	-0,90	-59,34
Kep. Babel	-0,80	-55,07	Sulawesi Tengah	(insig) -0,12	-11,31
DKI Jakarta	-2,15	-88,35	Sulawesi Selatan	-0,45	-36,24
Jawa Barat	-0,63	-46,74	Sulawesi Tenggara	(insig) -0,16	-14,79
Jawa Tengah	(insig) -0,19	-17,30	Gorontalo	0,39	47,70
DI Yogyakarta	-0,27	-23,66	Maluku	0,61	84,04
Jawa Timur	-0,46	-36,87	Maluku Utara	-0,46	-36,87
Banten	-0,93	-60,54	Papua	1,23	242,12
<i>Constanta</i> (2,79				

Keterangan: *insig* menunjukkan koefisien *dummy* tidak signifikan di bawah tingkat signifikan $\alpha = 5$ persen.

Sumber: BPS, 2020 (diolah).

Penelitian ini juga menggunakan variabel *dummy* untuk mengontrol efek variasi antarprovinsi dalam model. Koefisien *dummy* menggambarkan pengaruh setiap provinsi terhadap koefisien konstan dalam model yang dibangun. Provinsi rujukan adalah Provinsi Aceh, provinsi paling barat Indonesia. Di antara 29 variabel *dummy* sebagai unit observasi, terdapat 5 koefisien *dummy* yang tidak signifikan dalam model di bawah tingkat kepercayaan $\alpha=5$ persen (Tabel 4). Variasi data di antara 30 provinsi tersebut cukup besar, pengaruh terendah sebesar -88,35 (Provinsi DKI Jakarta), dan tertinggi 242,12 (Provinsi Papua), *ceteris paribus*.

KESIMPULAN

Studi ini menganalisis pengaruh kenaikan TPAKP di Indonesia terhadap upah riil per jam dengan menggunakan data Sakernas, Susenas, dan PDRB. Analisis dengan menggunakan metode inferensial berupa regresi panel data dengan efek acak menemukan beberapa hal substansif sebagai berikut bahwa *Pertama*, peningkatan TPAKP di Indonesia ternyata memberikan efek negatif pada tingkat upah riil per jam, baik untuk pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Hasil temuan ini sejalan dengan studi literatur yang telah dilakukan, yakni bahwa peningkatan pekerja perempuan yang diduga bekerja pada industri dengan level produktivitas yang rendah dapat membawa efek buruk bagi tingkat upah riil pekerja secara keseluruhan. *Kedua*, ketika variabel independen PDRB per kapita dan rata-rata

lama sekolah meningkat, upah riil per jam juga akan meningkat. Temuan ini juga sejalan dengan sejumlah teori terkait pengaruh dua variabel tersebut terhadap upah riil per jam. Ketiga, dengan dilakukannya analisis inferensial pada tingkat provinsi, terbukti bahwa variasi antarprovinsi tersebut besar, yang artinya kondisi peningkatan TPAKP di tiap provinsi di Indonesia cukup berbeda.

Berdasarkan beberapa temuan penting sebelumnya maka dapat direkomendasikan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut, yaitu *pertama*, keberhasilan pembangunan dalam aspek kesetaraan gender sebenarnya bukan tentang angka indikator yang tinggi, tetapi lebih pada kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja perempuan. Pekerja perempuan di Indonesia terindikasi cenderung bekerja di industri dengan tingkat produktivitas tenaga kerja rendah sehingga tidak mungkin memperoleh penghasilan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangganya. Karena keputusan perempuan untuk memasuki pasar kerja tidak dapat dibatasi, kebijakan terkait peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di industri yang lebih produktif menjadi sangat penting, termasuk di antaranya mengatasi berbagai kendala yang memengaruhi waktu mereka di pasar kerja. Putus sekolah karena bekerja, tingginya permintaan pekerjaan domestik dalam rumah, dan pada saatnya harus mengambil tugas pengasuhan anak-anaknya merupakan beberapa kendala yang dihadapi perempuan Indonesia di negara dengan

budaya patriarki. Di sisi lain, meskipun penelitian ini menemukan bahwa tingkat TPAKP yang lebih tinggi dapat mengecilkan tingkat upah riil per jam, tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi mereka dapat membantu keluarganya keluar dari kemiskinan seiring dengan peningkatan pendapatan keluarga.

Kedua, penelitian ini pada awalnya juga memasukkan upah minimum sebagai variabel penjelas tambahan dan tidak menemukan pengaruh yang signifikan, yang menyiratkan bahwa kebijakan upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah riil per jam. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa kebijakan upah minimum tidak mendukung sisi pekerja, tetapi lebih melindungi kebutuhan industri. Karena tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk memberikan upah yang layak bagi pekerja, maka tinjauan menyeluruh atas kebijakan ini menjadi penting untuk dilakukan.

Adapun beberapa hal yang belum terpecahkan dalam studi ini seperti penambahan variabel karakteristik wilayah/provinsi yang dapat menjadi isu menarik dan penting dalam studi selanjutnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan makro, sehingga diharapkan penelitian ke depan dilakukan dengan pendekatan mikro, terutama di provinsi dengan tingkat TPAKP tinggi tetapi dengan nilai upah riil yang rendah. Sebagai tambahan, terkait pengaruh yang tidak signifikan dari kebijakan upah minimum terhadap upah riil per jam yang dibahas sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian yang menunjukkan pengaruh kebijakan tersebut dalam memengaruhi keputusan perempuan untuk memasuki pasar kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin. Tiada daya dan upaya tanpa pertolongan-Nya, dan penulis menyampaikan terima kasih pada kedua orang tua dan mertua, Dini Amirul, Siti Yasmine Aulia, dan Muhammad Yahya Ayyash atas do'a yang tidak terputus. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Yonosuke Hara (GRIPS Jepang) dan Dr. Arie Damayanti (PPIE-UI) yang memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan studi ini. Untuk ketersediaan data, penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap rekan kerja di BPS dan PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPS. (2018). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Borjas, G.J. (2016). *Labor economics* (7th ed., Vol. 43). New York: McGraw-Hill Education.
- Mankiw, N.G. (2013). *Macroeconomics*, 8th ed. New York: Worth Publishers.
- McConnell, C.R., Brue, S.L., & Macpherson, D.A. (2017). *Contemporary labor economics*. Dubuque, IA: McGraw-Hill Education.
- Wooldridge, J.M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*, 2nd ed. Cambridge: The MIT Press.
- Wooldridge, J.M. (2016). *Introductory econometrics: a modern approach*, 6th ed. Mason, USA: South-Western, Cengage Learning.

Jurnal dan Working Paper

- Acemoglu, D., Autor, D.H., & Lyle, D. (2004). Women, war, and wages: The effect of female labor supply on the wage structure at midcentury. *Journal of Political Economy*, 112(3), 497-551.
- Agénor, P.R., & Canuto, O. (2015). Gender equality and economic growth in Brazil: A long-run analysis. *Journal of Macroeconomics*, 43, 155-172.
- Allen, E.R. (2016). Analysis of trends and challenges in the Indonesian Labor Market. *Asian Development Bank (ADB) Papers on Indonesia* No. 16.
- Appiah, E.N. (2018). Growth in developing countries. *Global Journal of Human-Social Science: Economics*, 18(2), 1-6.
- Bellou, A., & Cardia, E. (2018). Great depression and the rise of female employment: A new hypothesis. *IZA Discussion Paper Series*, No. 120204.
- Cascio, E. U., Haider, S. J., & Nielsen, H. S. (2015). The effectiveness of policies that promote labor force participation of women with children: A collection of national studies. *IZA Discussion Paper Series*, No. 9297.
- Cubas, G. (2016). Distortions, infrastructure, and female labor supply in developing countries. *European Economic Review*, 87, 194-215.

- Flabbi, L., Macis, M., Moro, A., & Schivardi, F. (2019). Do female executives make a difference? The impact of female leadership on gender gaps and firm performance. *The Economic Journal*, 129(622), 2390-2423.
- Gaddis, I. & Klasen, S. (2014). Economic development, structural change, and women's labor force participation: A reexamination of the feminization U hypothesis. *Journal of Population Economics*, 27(3), 639-681.
- Hassan, S. & Rafaz, N. (2017). The role of female education in economic growth of Pakistan: A time series analysis from 1990-2016. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 3(5), 83-93.
- Haq, U., & Amin, A. (2017). The role of working women in poverty reduction (A case study of district peshawar). *The Dialogue*, 12(2), 110-134.
- Ma, L. (2014). Economic crisis and women's labour force return after childbirth: Evidence from South Korea. *Demographic Research*, 31, 511-552.
- Mawadah, S. (2017). Kurva penawaran tenaga kerja dan jam kerja perempuan. *Jurnal Studi Gender*, 12(3), 357-370.
- Noveda, D., Aimon, H., & Syofyan, E. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6).
- Pleic, M. & Berry, A. (2009). Employment and economic growth: A review of employment elasticities. *Human Sciences Research Council*, (April).
- Schaner, S., & Das, S. (2016). Female labor force participation in Asia: Indonesia country study. *ADB Economics Working Paper*, 474.
- Verick, S. (2014). Female labor force participation in developing countries. *IZA World of Labor*, 87, 1-10.
- Verme, P. (2014). Economic development and female labor participation in the middle east and North Africa : A test of the U-shape hypothesis. *Policy Research Working Paper*; No. 6927.
- Weinstein, A.L. (2017). Working women in the city and urban wage growth in the United States. *Journal of Regional Science*, 57(4), 591-610.
- Tesis**
- Jahnke, C. M. (1998). The effect of increases in labor supply on real wages. Master Theses, Eastern Illinois University, Illinois, MA
- Laporan**
- World Bank. (2019). *Indonesia economic quarterly, December 2019: Investing in people*. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33033> License: CC BY 3.0 IGO.